

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba meneliti mengenai asimetri informasi, mekanisme *corporate governance* dan praktik *earnings management* di Indonesia, secara keseluruhan objek penelitiannya menggunakan perusahaan yang terdaftar dalam kategori indeks konvensional (pasar modal konvensional), belum banyak peneliti yang mencoba untuk meneliti *earnings management* pada indeks syariah (pasar modal syariah). Hasil penelitian terdahulu terangkum sebagai berikut terkait praktik manajemen laba yang dipengaruhi oleh asimetri informasi dan mekanisme *corporate governance*.

Penelitian pertama dilakukan oleh Ni Wayan Nariastiti dan Ni Made Dwi Ratnadi. Sampel ditentukan dengan *purposive sampling* dengan jumlah 65 perusahaan. Data dianalisis dengan regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan asimetri informasi yang diukur dengan *bid-ask spread* berpengaruh positif pada manajemen laba, *corporate governance* diukur dengan skor CGPI tidak berpengaruh, dan ukuran perusahaan diukur dengan total aset tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian kedua dilakukan oleh Andreani Caroline Barus dan Kiki Setiawati pada tahun 2015. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Dengan metode *purposive sampling*, diperoleh 82 perusahaan dari 132 perusahaan manufaktur yang sesuai dengan kriteria penelitian yang mana akan dijadikan sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa asimetri informasi, mekanisme *corporate governance*, dan beban pajak tangguhan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010–2012. Namun secara parsial, kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba,

sedangkan asimetri informasi, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan beban pajak tanggungan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010–2012.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Eny Kusumawati, Shinta Permata Sari, dan Rina Trisnawati. Asimetri informasi dan mekanisme *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *earnings management* dalam indeks konvensional kecuali untuk ukuran dewan komisaris yang berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Asimetri informasi dan mekanisme *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *earnings management* dalam indeks syariah kecuali untuk ukuran dewan komisaris dan kepemilikan institusional yang berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Penelitian keempat dilakukan oleh Husnah Nur Laela Ermaya dan Miguna Astuti pada tahun 2017. Sampel pada penelitian ini sebanyak 20 perusahaan perbankan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012-2016. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Analisis ini menggunakan regresi linear berganda yang sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik. Hasil analisis regresi linear berganda ini menunjukkan bahwa asimetri informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian kelima dilakukan oleh Utari dan Sari pada Tahun 2016. Penelitian tersebut tentang pengaruh asimetri informasi, kepemilikan manajerial pada manajemen laba. Penelitian dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2013 sebanyak 38 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian keenam dilakukan oleh Lilik Pujiati dan Iis Wahyuningsih. Peneliti menggunakan sampel bank syariah dan bank konvensional tahun 2010-2014. Peneliti menemukan bahwa bank syariah melakukan manajemen laba lebih rendah daripada bank konvensional. Hasil tersebut diketahui dari jumlah peringkat yang lebih tinggi dari bank konvensional yaitu sebesar $66.00 > 54.00$. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki *non-discretionary accrual* yang lebih rendah daripada bank konvensional .

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Retno Haryati dan Ari Dewi Cahyati. Hasil menunjukkan selama periode 2010-2014 terdapat 10 perusahaan yang melakukan manajemen laba riil. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan MLR dalam penelitian ini maka disimpulkan bahwa ada indikasi praktik manajemen laba akrual pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) selama periode 2010 sampai dengan 2013. Hasil penelitian mengenai GCG yang diproksi dengan kepemilikan institusional dan komite audit menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba akrual sedangkan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba akrual.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Sinan S. Abbadi, Qutaiba F. Hijazi dan Ayat S. Al-Rahahleh. Penelitian ini menyelidiki pengaruh kualitas *corporate governance* terhadap manajemen laba di Yordania yang menggunakan set data panel dari semua perusahaan industri dan jasa yang terdaftar di *Amman Stock Exchange* (ASE) selama periode 2009-2013. Penelitian ini membuktikan bahwa *corporate governance* memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Joshua Yindenaba Abor, Mawuena Akosua Kukah, dan Mohammed Amidu. Penelitian ini menganalisis keterlibatan dari *internal corporate governance mechanism* dalam kualitas informasi akuntansi di Ghana dengan menggunakan *discretionary accrual* sebagai proxynya. Penelitian empiris ini mengambil sampel dari 20 lembaga non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Ghana (GSE) untuk periode 11 tahun (2003-2013). Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional membatasi oportunistik manajer untuk memanipulasi pendapatan ke kualitas informasi akuntansi yang lebih tinggi.

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Fatemeh Dadbeh dan Narjes Mogharebi. Penelitian ini menggunakan 47 perusahaan yang terdaftar dalam *Tehran Stock Exchange* selama periode 2002-2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Manajemen Laba (*Earnings Management*)

2.2.1.1 Pengertian Manajemen Laba

“Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi dengan tujuan tertentu oleh manajemen dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuannya sendiri.” (Schipper, 1989 dalam Subramanyam, 2017 terjemahan Dewi Yanti, 2018: 117).

Earnings Management atau manajemen laba ialah perilaku manajer dalam mempertinggi atau menurunkan laba yang akan disampaikan kepada pemilik perusahaan dengan tidak meningkatkan atau menurunkan profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut (Nariastiti & Ratnadi, 2014).

Manajemen laba menurut Runturambi et al. (2017) adalah manajemen laba merupakan keputusan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk meningkatkan laba atau mengurangi kerugian yang dilaporkan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *earnings management* adalah suatu penyusunan laporan keuangan yang sengaja dilakukan oleh manajemen yang ditunjukkan kepada pihak eksternal dengan cara menaikkan dan menurunkan laporan laba dengan tujuan menciptakan kinerja perusahaan agar

terkesan lebih baik dari yang sebenarnya dan untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

2.2.1.2 Strategi Manajemen Laba

Scott (1997) dalam Khaiyat (2014) merangkum pola umum yang banyak dilakukan dalam praktik manajemen laba, yaitu :

1. *Taking a Bath*, Pola ini dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan tahun berjalan menjadi sangat tinggi atau rendah dibandingkan dengan laba periode tahun sebelumnya atau tahun berikutnya. Pola ini biasa dipakai pada perusahaan yang sedang mengalami masalah organisasi (*organizational stress*) atau sedang dalam proses pergantian pimpinan manajemen perusahaan.
2. *Income Minimization*, Pola ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada masa mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. Pola ini relatif sering dilakukan dengan motivasi perpajakan dan politis.
3. *Income Maximization*, Pola ini merupakan kebalikan dari pola *income minimization*. Dilakukan pada saat laba menurun yang bertujuan untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang maupun oleh perusahaan yang akan melakukan IPO agar mendapat kepercayaan dari kreditor.
4. *Income Smoothing*, Pola ini dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

2.2.1.3 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Barus & Setiawati (2015) terdapat 3 (tiga) hipotesis yang mendorong perusahaan melakukan manajemen laba:

- a) *The bonus plan hypothesis* yaitu manajer perusahaan yang memiliki program bonus yang terkait dengan angka-angka akuntansi cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser pelaporan laba dari periode mendatang ke periode tahun berjalan (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang).
- b) *The debt covenant hypothesis* yaitu perusahaan yang terancam melanggar konvensi perjanjian utang cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser pelaporan laba dari periode mendatang ke periode tahun berjalan.
- c) *The political cost hypothesis* yaitu semakin besar politis yang dihadapi suatu perusahaan, manajer cenderung memilih prosedur akuntansi yang menanggukkan pelaporan laba periode mendatang ke periode tahun berjalan (menurunkan laba yang dilaporkan sekarang).

2.2.1.4 Teknik Manajemen Laba

Ronen dan Sadan (1975) dalam penelitian Abdurrahim (2014) menjelaskan bahwa terdapat beberapa teknik yang dilakukan oleh manajemen untuk melakukan *earnings management*, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan waktu kejadian dan pengakuan melalui kebijakan yang dibuat.
2. Mengalokasikan biaya atau pendapatan pada periode tertentu.
3. Manajemen memiliki kebijaksanaan sendiri dalam mengklasifikasikan pos-pos dalam laba rugi ke dalam kategori yang dikehendaki.

2.2.2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) menimbulkan terjadinya manajemen laba. Menurut teori keagenan (*agency theory*), adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelola perusahaan yang memicu konflik keagenan. Teori keagenan

mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai *agent* dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai *principal* (Kusumawati et al., 2013). *Principal* menyediakan fasilitas dan dana untuk mengelola perusahaan, di lain pihak manajemen mempunyai kewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai dengan yang diamanahkan oleh pemegang saham kepadanya. *Agent* diwajibkan untuk memberikan laporan periodik pada *principal* tentang usaha yang dijelankannya. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan sarana akuntabilitas manajemen kepada pemiliknya (Barus & Setiawati, 2015).

Adanya perbedaan kepentingan antara manajer (*agent*) sebagai pengelola perusahaan dan pemilik (*principal*) sebagai pemilik perusahaan akan menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan (*agency conflict*) (Trisnawati et al., 2016). Pada kondisi seperti itu, pemilik (*principal*) dapat mengatasi konflik keagenan dengan memberikan insentif yang layak kepada manajer (*agent*) dan harus bersedia mengeluarkan biaya pengawasan yang disebut dengan biaya keagenan (*agency cost*).

Siagian (2015) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi dasar sifat manusia menurut Eisendhart (1989), yaitu :

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*);
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*); dan
3. Manusia selalu menghindari risiko (*risk adverse*).

Dapat disimpulkan dari tiga asumsi sifat dasar manusia di atas, konflik keagenan yang sering terjadi di antara manajer dan pemegang saham disebabkan oleh adanya sifat dasar manusia tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak oportunistik, yaitu mementingkan kepentingan pribadinya.

2.2.3. Asimetri Informasi

Menurut Suwardjono (2016:584) asimetri informasi adalah kondisi di mana manajemen sebagai pihak yang lebih banyak menguasai informasi dibandingkan dengan investor atau kreditor. Menurut Barus & Setiawati (2015) asimetri informasi adalah suatu keadaan di mana *agent* (manajemen) mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan *principal* (pemilik) (Barus & Setiawati, 2015). Dapat disimpulkan bahwa, asimetri informasi merupakan suatu keadaan di mana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Sunarto dan Sundarta (2015) menambahkan bahwa jika kedua kelompok, yaitu *agent* dan *principal* adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa *agent* tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kegiatan *principal*. *Principal* dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat bagi *agent* dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas *agent* yang menyimpang. Perbedaan dalam hal preferensi mengenai kompensasi dan keuntungan juga timbul ketika *principal* tidak memonitor tindakan *agent*.

Manajemen yang ingin menunjukkan kinerja yang baik dapat termotivasi untuk memodifikasi laporan keuangan agar menghasilkan laba seperti yang diinginkan oleh pemilik (Barus & Setiawati, 2015). Asimetri informasi antara manajemen dan pemilik dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba karena manajer lebih *superior* dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemilik).

Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong manajemen (*agent*) untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui pemilik (*principal*) sebagai pemilik. Sehingga dengan adanya

asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka meningkatkan utilitasnya. Fleksibilitas manajemen untuk memanipulasi laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba.

Jenis-jenis asimetri informasi ada 2 (dua), yaitu (Lisa, 2012):

- 1) *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
- 2) *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Jadi dengan adanya asimetri informasi, memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingannya sendiri.

2.2.4. Mekanisme *Corporate Governance*

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), *Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER—01/MBU/2011 tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance—GCG*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip yang dapat mendorong kinerja perusahaan untuk berfungsi secara efisien dengan berlandaskan hukum dan peraturan yang berlaku.

2.2.4.1. Konsep *Corporate Governance*

Menurut Effendi (2016:3) dalam *The Power of Corporate Governance*, implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance—GCG*) menyangkut pengembangan dua aspek yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yaitu: perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). *Hardware* yang lebih bersifat teknis mencakup pembentukan atau perubahan struktur dan sistem organisasi. Sementara itu, *software* yang lebih bersifat psikososial mencakup perubahan paradigma, visi, misi, nilai (*values*), sikap (*attitude*), dan etika berperilaku (*behavioral ethics*).

Sistem tata kelola yang baik di perusahaan dipastikan dapat mengurangi pengelolaan laba yang berlebihan. Hal ini dikarenakan GCG lebih menekankan kepada keuntungan yang *efficient contracting*, keuntungan yang diperoleh dan dimiliki oleh semua pihak yang terkait (Nariastiti & Ratnadi, 2014). GCG mempunyai peranan penting dalam memajukan efisiensi ekonomis, baik hubungan antara pengelola perusahaan, para pemilik perusahaan, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya. GCG akan memberikan fasilitas dalam menunjang tujuan dari suatu perusahaan dalam menentukan teknik *monitoring* kinerja.

2.2.4.2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Sutedi (2011:4) mengatakan secara umum terdapat lima prinsip dasar dari GCG, yaitu :

- 1) *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan;
- 2) *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- 3) *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan ketika perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *Stockholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi dari GCG adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui *supervise* atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku.

2.2.4.3. Tujuan Penerapan *Corporate Governance*

Penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN menurut Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER—01/MBU/2011, bertujuan untuk :

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Tujuan lain dari *penerapan Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan mekanisme *corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan dan juga untuk semua pihak yang bersangkutan, dan *corporate governance* dapat meningkatkan kepercayaan investor.

2.2.4.4. Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta peran pemegang kepentingan internal atau eksternal lainnya sehubungan dengan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan

kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Barus & Setiawati, 2015). Terdapat tiga mekanisme *corporate governance* yang dipakai dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan keberadaan komite audit.

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Haryati & Cahyati, 2015). Kepemilikan suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan institusional maupun kepemilikan individual, atau campuran keduanya dengan proposal tertentu. Investor institusional memiliki beberapa, yaitu (Hidayat, 2016):

- 1) Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih untuk mendapatkan informasi;
- 2) Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi;
- 3) Investor institusional, secara umum memiliki relasi bisnis yang lebih kuat dengan manajemen;
- 4) Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Hidayat, 2016). Manajemen laba ditentukan oleh motivasi manajemen perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antar manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria, yaitu (Premanichnukul & Krittaya, 2012):

- 1) Perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer dan pemilik (*owner manager*);
- 2) Perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non pemilik (*non-owners manager*).

Menurut Premanichnukul & Krittaya (2012) salah satu mekanisme yang digunakan untuk mencoba menurunkan konflik yang disebabkan oleh pemisah kepemilikan dan kontrol diantaranya kedua belah pihak adalah dengan menawarkan manajer untuk berpartisipasi dalam program opsi saham yang dikenal sebagai kompensasi berbasis saham (*stock-based compensation*). Pemberian kompensasi ini untuk manajer akan mengakibatkan peningkatan kepemilikan manajerial.

Berarti dalam hal ini manajer merangkap sebagai pemilik/pemegang saham sekaligus sebagai pihak manajer aktif/pengelola ikut dalam pengambilan keputusan di suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan perwujudan dari prinsip transparansi dari *corporate governance*. Adanya kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajemen yang meningkat. Kepemilikan oleh manajemen yang besar akan efektif *me-monitoring* aktivitas perusahaan.

3. Komite Audit

Dalam FCGI (2000) dinyatakan bahwa Komite Audit memiliki tugas terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, Komite Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. Jumlah anggota Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang

produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan suatu komponen yang baru dalam perusahaan yang memiliki peranan sangat vital sebagai sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan. Seperti dalam Kep. 29/PM/2004 yang menuliskan tugas dari komite audit adalah :

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
- 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
- 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap *Earnings Management*

Teori keagenan (*agency theory*) dapat menjelaskan praktik manajemen laba (*earnings management*) yaitu karena adanya asimetri informasi (*information asymmetry*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa akan datang daripada pemilik. Semakin besar asimetri informasi yang terjadi maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya manajemen laba (Kusumawati et al., 2013).

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba. Darmayanti et al. (2017), Nariastiti & Ratnadi (2014), dan Wicaksono (2015) membuktikan bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh positif terhadap *earnings management*. Pendapat ini pun didukung oleh penelitian Utari et al. (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Berbeda dengan Barus & Setiawati (2015) dan Kusumawati et al. (2013) yang menyatakan bahwa asimetri informasi tidak memiliki pengaruh terhadap *earnings management*. Sehingga dari hasil penelitian terdahulu beserta teori di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$H_1 =$ Asimetri informasi dalam JII berpengaruh terhadap *earnings management*.

2.3.2. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Earnings Management*

Teori agensi memberikan pandangan bahwa masalah *earnings management* dapat diminimumkan dengan pengawasan sendiri melalui *corporate governance*. Praktik *earnings management* oleh manajemen dapat diminimumkan melalui kepemilikan saham oleh pihak institusional karena mereka dianggap sebagai *sophisticated investor* dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan *earnings management* (Kusumawati et al., 2013).

Hasil penelitian Asward & Lina (2015) dan Hidayat (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *earnings management*. Pendapat tersebut didukung oleh penelitian dari Kusumawati et al., (2013) yang menyimpulkan tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga mengurangi perilaku *opportunistic*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Barus & Setiawati (2015), Haryati & Cahyati (2015), dan Nariastiti & Ratnadi (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *earnings management*. Sehingga dari hasil penelitian terdahulu beserta teori di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₂ = Kepemilikan Institusional dalam JII berpengaruh terhadap *earnings management*.

2.3.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Earnings Management*

Menurut Jensen dan Meckling (1976) praktik *earnings management* oleh manajemen dapat diminimumkan dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (*manajerial ownership*). Struktur kepemilikan saham menunjukkan bagaimana distribusi kekuasaan dan pengaruh pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. Menurut Febyani & Devie (2017) konsentrasi kepemilikan manajerial dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring. Karena dengan kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi yang signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasional yang dimiliki manajemen.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asward & Lina (2015), Febyani & Devie (2017), dan Widyaningsih (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *earnings management*. Pendapat tersebut didukung oleh teori dalam penelitian Kusumawati et al. (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang tinggi akan dapat mengurangi aktivitas manajemen laba. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2016),

Kusumawati et al. (2013), dan Nariastiti & Ratnadi (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *earnings management*. Sehingga dari hasil penelitian terdahulu beserta teori di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₃ = Kepemilikan Manajerial dalam JII berpengaruh terhadap *earnings management*.

2.3.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Earnings Management*

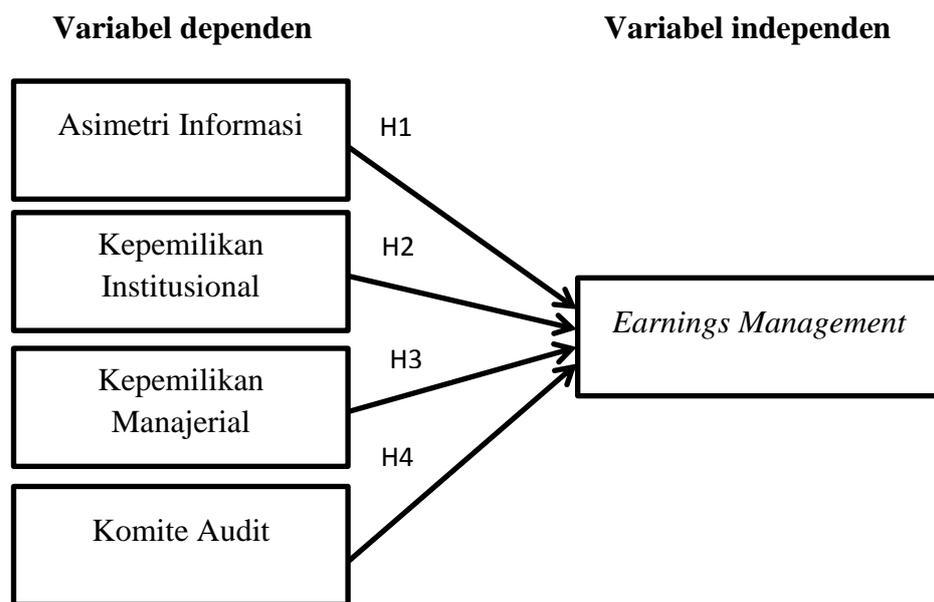
Tindakan *earnings management* yang dilakukan oleh manajemen dapat diminimumkan dengan adanya komite audit yang dapat mengurangi aktivitas *earnings management* yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba (Nariastiti & Ratnadi, 2014). Menurut Haryati & Cahyati (2015) semakin banyak komite audit yang memahami tentang keuangan dan standar akuntansi justru akan membatasi manajemen dalam menemukan celah untuk melakukan manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit ialah untuk menjalankan fungsi pengawasan yang seharusnya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryanto (2014), Asward & Lina (2015), Haryati & Cahyati (2015), dan Hidayat (2016) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *earnings management*. Pendapat ini didukung oleh Wilopo (2004) dalam Kusumawati et al. (2013) yang menemukan bahwa kehadiran komite audit secara efektif menghalangi peningkatan manajemen laba di perusahaan tersebut. Sedangkan, hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati et al. (2013) dan Nariastiti & Ratnadi (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *earnings management*. Sehingga dari hasil penelitian terdahulu beserta teori di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₄ = Komite Audit dalam JII berpengaruh terhadap *earnings management*.

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka pemikiran adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu Sugiyono (2017: 96). Kerangka pemikiran akan menghubungkan secara teori antara variabel-variabel penelitian yaitu variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependen). Dalam penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas dan satu variabel terikat.



Keterangan :

Y = *Earnings Management*

X_1 = Asimetri Informasi

X_2 = Kepemilikan Institusional

X_3 = Kepemilikan Manajerial

X_4 = Komite Audit